**Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang**
**e-ISSN: 2775-9768 | p-ISSN: 2777-0974**
Vol. 6 No. 2, Oktober 2026
hompage journal: https://journal.unespadang.ac.id/jaaip

# Transparansi, Akuntabilitas dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Instansi Pemerintah: Moderasi Komitmen Organisasi

**Wan Raudhatul Jannah Syah Putri [1*], Maya Sari [2], Syafrida Hani [3]**
[1,2,3] Magister Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

***Coresponding author:** Wan Raudhatul Jannah Syah Putri wanraudha881@gmail.com

**Abstrak:** Kinerja instansi pemerintah daerah sangat ditentukan oleh tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan memiliki sasaran yang jelas. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menunjukkan capaian yang belum optimal, sehingga topik ini penting diteliti untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja instansi pemerintah, serta menguji peran komitmen organisasi sebagai variabel moderating. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif pada 33 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang. Sampel ditentukan secara purposive sehingga diperoleh 99 responden yang terdiri atas Kepala Dinas, Kepala Subbagian Umum, dan Bendahara. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis dengan Structural Equation Modeling-Partial Least Square menggunakan SmartPLS versi 4.0. Transparansi (β = 0,236; p = 0,000), akuntabilitas (β = 0,220; p = 0,001), dan kejelasan sasaran anggaran (β = 0,234; p = 0,000) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah dengan nilai R-Square sebesar 0,738. Komitmen organisasi terbukti memoderasi ketiga hubungan tersebut dengan nilai p masing-masing 0,000; 0,017; dan 0,001. Penguatan transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan sasaran anggaran yang didukung komitmen organisasi pegawai merupakan prioritas kebijakan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah daerah secara berkelanjutan.

**Artikel Histori**
Direvisi: 13-08-2026
Diterima: 22-09-2026
Diterbitkan: 15-10-2026

***Kata Kunci:***
Akuntabilitas; Kejelasan Sasaran Anggaran; Kinerja Instansi Pemerintah; Komitmen Organisasi; Transparansi.

***Abstract:*** *The performance of local government agencies is largely determined by transparent, accountable budget management with clear objectives. The performance accountability evaluation of Deli Serdang Regency shows results that are not yet optimal, making this topic important to examine in order to improve the effectiveness of regional financial management. This study aims to analyze the effect of transparency, accountability, and budget goal clarity on government agency performance, and to examine the role of organizational commitment as a moderating variable. This study applies a quantitative associative approach to 33 Regional Government Units of Deli Serdang Regency. Purposive sampling produced 99 respondents consisting of Heads of Department, Heads of General Affairs Subdivision, and Treasurers. Data were collected through Likert-scale questionnaires and analyzed using Structural Equation Modeling-Partial Least Square with SmartPLS version 4.0. Transparency (β = 0.236; p = 0.000), accountability (β = 0.220; p = 0.001), and budget goal clarity (β = 0.234; p = 0.000) have positive and significant effects on government agency performance, with an R-Square of 0.738. Organizational commitment moderates all three relationships, with p-values of 0.000, 0.017, and 0.001 respectively. Strengthening transparency, accountability, and budget goal clarity supported by employee organizational commitment is a policy priority for sustainably improving local government agency performance.*

***Keywords:***
*Accountability; Budget Goal Clarity; Government Agency Performance; Organizational Commitment; Transparency.*

## PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga anggaran yang disusun dapat seimbang

DOI: https://doi.org/10.31933/wf22as06
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

dengan kinerja yang direncanakan (Pratolo, Sofyani, & Anwar, 2020; Hutagalung, Sari, & Irfan, 2024). Penguatan pendekatan tersebut ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang mewajibkan penggunaan pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja dengan menekankan keterkaitan antara alokasi anggaran dan capaian keluaran maupun hasil yang terukur pada setiap program dan kegiatan pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang menerapkan anggaran berbasis kinerja dan dituntut menyelenggarakan pelayanan publik yang transparan serta akuntabel sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Untuk mengukur sejauh mana implementasi tersebut berjalan, Kementerian PANRB melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021, yang menilai keterkaitan antara perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

Hasil evaluasi AKIP Kabupaten Deli Serdang tahun 2023–2025 menunjukkan capaian kinerja yang belum sepenuhnya optimal, dengan sejumlah sasaran strategis masih berada di bawah target yang direncanakan. Permasalahan tersebut antara lain mencakup belum tercapainya target anggaran secara konsisten sepanjang tahun 2021–2025, kejelasan sasaran anggaran yang belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam mengevaluasi capaian kinerja, akuntabilitas yang belum efektif akibat keterlambatan penyediaan dokumen perencanaan dan keuangan, serta kendala teknis pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang menghambat efektivitas pengelolaan anggaran. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan sasaran anggaran belum optimal dalam mendorong kinerja instansi pemerintah.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja instansi pemerintah. Ketidakkonsistenan tersebut mengindikasikan adanya variabel lain yang turut memengaruhi hubungan antarvariabel, salah satunya komitmen organisasi (Marbun, Sari, & Irfan, 2021; Kuntadi & Velayati, 2022). Komitmen organisasi yang kuat diyakini mampu memperkuat pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja instansi pemerintah, meskipun penelitian Ismid, Kusmanto, dan Lubis (2020) memperoleh hasil yang berbeda. Kesenjangan hasil penelitian inilah yang menjadi celah kajian dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja instansi pemerintah, serta menguji peran komitmen organisasi sebagai variabel moderating pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Deli Serdang. Hipotesis yang diajukan adalah transparansi (H1), akuntabilitas (H2), dan kejelasan sasaran anggaran (H3) berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah; serta komitmen organisasi memoderasi pengaruh transparansi (H4), akuntabilitas (H5), dan kejelasan sasaran anggaran (H6) terhadap kinerja instansi pemerintah. Secara akademik penelitian ini memperkaya kajian akuntansi sektor publik pada konteks pemerintah daerah, sedangkan secara praktis hasilnya diharapkan menjadi dasar perumusan kebijakan penguatan tata kelola anggaran di Kabupaten Deli Serdang.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif untuk menguji pengaruh transparansi (X1), akuntabilitas (X2), dan kejelasan sasaran anggaran (X3) terhadap kinerja instansi pemerintah (Y), dengan komitmen organisasi (Z) sebagai variabel moderating (Sugiyono, 2018). Populasi penelitian adalah seluruh 33 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik non-probability sampling melalui pendekatan purposive sampling, sehingga diperoleh 99 responden yang mewakili Kepala Dinas, Kepala Subbagian Umum, dan Bendahara pada masing-masing OPD. Seluruh kuesioner yang disebarkan kembali dan terisi lengkap sehingga tingkat pengembalian mencapai 100%.

Variabel transparansi diukur melalui indikator kualitas informasi, pengelolaan anggaran, dan kebebasan anggaran; akuntabilitas diukur melalui standar operasional, pengelolaan anggaran, dan pertanggungjawaban; kejelasan sasaran anggaran diukur melalui tujuan, kinerja dan sasaran, serta tingkat kesulitan; kinerja instansi pemerintah diukur melalui ekonomis dan efisiensi, efektivitas, serta outcome;

sedangkan komitmen organisasi diukur melalui komitmen afektif, berkelanjutan, dan normatif. Seluruh indikator dijabarkan dalam butir pernyataan dengan skala Likert lima poin.

Data dianalisis menggunakan teknik Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4.0. Pengujian dilakukan dalam dua tahap, yaitu evaluasi model pengukuran (outer model) yang mencakup validitas konvergen melalui outer loading dan Average Variance Extracted (AVE), validitas diskriminan melalui cross loading, serta reliabilitas melalui composite reliability dan Cronbach's alpha; dan evaluasi model struktural (inner model) yang mencakup R-Square, F-Square, serta pengujian hipotesis melalui path coefficient, t-statistics, dan p-values dengan prosedur bootstrapping. Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai p-value lebih kecil dari 0,05 (Hair et al., 2006; Chin, 1998).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil pengolahan data penelitian yang diuraikan ke dalam empat subbagian, yaitu karakteristik responden, hasil evaluasi model pengukuran, hasil evaluasi model struktural, dan hasil pengujian hipotesis, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan serta implikasi temuan.

### Hasil *Karakteristik Responden*

Kuesioner disebarkan kepada 99 responden pada 33 OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan seluruhnya kembali serta terisi lengkap (100%). Karakteristik responden disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Karakteristik responden penelitian

| Karakteristik | Kategori | Frekuensi | Persentase |
|---|---|---|---|
| Jenis kelamin | Laki-laki | 66 | 66,7% |
| | Perempuan | 33 | 33,3% |
| Usia | < 30 tahun | 7 | 7,1% |
| | 30–35 tahun | 10 | 10,1% |
| | 36–40 tahun | 51 | 51,5% |
| | > 40 tahun | 31 | 31,3% |
| Pendidikan | D3 | 8 | 8,1% |
| | S1 | 49 | 49,5% |
| | S2 | 38 | 38,4% |
| | S3 | 4 | 4,0% |
| Masa kerja | < 5 tahun | 17 | 17,0% |
| | 5–10 tahun | 36 | 36,4% |
| | > 10 tahun | 46 | 46,6% |

Sumber: Data primer diolah (2026)

Tabel 1 menunjukkan bahwa responden didominasi laki-laki (66,7%) dengan kelompok usia terbanyak 36–40 tahun (51,5%). Sebanyak 87,9% responden berpendidikan S1 dan S2, serta 83,0% responden telah bekerja lebih dari lima tahun di lingkungan pemerintahan. Komposisi ini menunjukkan bahwa responden memiliki kapasitas akademik dan pengalaman yang memadai untuk menilai praktik transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan sasaran anggaran di instansinya.

### *Hasil Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)*

Evaluasi model pengukuran dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas konstruk. Hasil uji validitas konvergen menunjukkan seluruh indikator memiliki nilai outer loading di atas 0,70, dengan nilai tertinggi 0,924 pada indikator akuntabilitas dan nilai terendah 0,700 pada indikator transparansi. Uji validitas diskriminan melalui cross loading memperlihatkan bahwa setiap indikator memiliki nilai tertinggi pada konstruknya sendiri, sehingga seluruh indikator dinyatakan memenuhi validitas diskriminan. Rekapitulasi nilai AVE, composite reliability, dan Cronbach's alpha disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2.** Hasil uji validitas konvergen dan reliabilitas konstruk

| Variabel | AVE | Composite Reliability | Cronbach's Alpha | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Transparansi | 0,710 | 0,933 | 0,917 | Valid dan reliabel |
| Akuntabilitas | 0,684 | 0,918 | 0,906 | Valid dan reliabel |
| Kejelasan Sasaran Anggaran | 0,652 | 0,902 | 0,893 | Valid dan reliabel |
| Kinerja Instansi Pemerintah | 0,696 | 0,947 | 0,945 | Valid dan reliabel |
| Komitmen Organisasi | 0,636 | 0,885 | 0,884 | Valid dan reliabel |

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS (2026)

Tabel 2 memperlihatkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai AVE di atas 0,50, sehingga setiap variabel laten mampu menjelaskan lebih dari 50% variansi indikatornya. Nilai composite reliability seluruh variabel berada di atas 0,600 dan nilai Cronbach's alpha di atas 0,700, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan layak digunakan pada tahap analisis selanjutnya (Hair et al., 2006).

### *Hasil Evaluasi Model Struktural (Inner Model)*

Evaluasi model struktural dilakukan melalui nilai koefisien determinasi (R-Square) dan ukuran efek (F-Square). Nilai R-Square kinerja instansi pemerintah sebesar 0,738 dengan R-Square Adjusted sebesar 0,717, yang berarti 73,8% variasi kinerja instansi pemerintah dapat dijelaskan oleh transparansi, akuntabilitas, kejelasan sasaran anggaran, dan komitmen organisasi, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Hasil selengkapnya disajikan pada Tabel 3.

**Tabel 3.** Hasil evaluasi model struktural *(R-Square dan F-Square)*

| Variabel | F-Square | Kategori pengaruh |
|---|---|---|
| Transparansi | 0,351 | Kuat |
| Akuntabilitas | 0,439 | Kuat |
| Kejelasan Sasaran Anggaran | 0,681 | Kuat |
| Komitmen Organisasi | 0,372 | Kuat |
| R-Square kinerja instansi pemerintah | 0,738 | Kuat |
| R-Square Adjusted | 0,717 | Kuat |

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS (2026)

Tabel 3 menunjukkan seluruh nilai F-Square berada di atas 0,35, yaitu kejelasan sasaran anggaran (0,681), akuntabilitas (0,439), komitmen organisasi (0,372), dan transparansi (0,351). Dengan demikian, keempat variabel tersebut memberikan pengaruh yang kuat terhadap kinerja instansi pemerintah, dengan kontribusi terbesar berasal dari kejelasan sasaran anggaran.

### *Hasil Pengujian Hipotesis*

Pengujian hipotesis pengaruh langsung dan pengaruh moderasi dilakukan melalui prosedur bootstrapping dengan kriteria signifikan apabila nilai p-value lebih kecil dari 0,05. Rekapitulasi hasil pengujian keenam hipotesis disajikan pada Tabel 4.

**Tabel 4.** Hasil pengujian hipotesis pengaruh langsung dan moderasi

| Hipotesis | Koefisien jalur | T-Statistics | P-Values | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| H1: Transparansi → Kinerja Instansi Pemerintah | 0,236 | 4,300 | 0,000 | Diterima |
| H2: Akuntabilitas → Kinerja Instansi Pemerintah | 0,220 | 4,080 | 0,001 | Diterima |
| H3: Kejelasan Sasaran Anggaran → Kinerja Instansi Pemerintah | 0,234 | 5,821 | 0,000 | Diterima |
| H4: Komitmen Organisasi memoderasi Transparansi → Kinerja Instansi Pemerintah | 0,290 | 3,230 | 0,000 | Diterima |

| Hipotesis | Koefisien jalur | T-Statistics | P-Values | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| H5: Komitmen Organisasi memoderasi Akuntabilitas → Kinerja Instansi Pemerintah | 0,208 | 3,211 | 0,017 | Diterima |
| H6: Komitmen Organisasi memoderasi Kejelasan Sasaran Anggaran → Kinerja Instansi Pemerintah | 0,245 | 3,209 | 0,001 | Diterima |

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS (2026)

Tabel 4 menunjukkan bahwa seluruh koefisien jalur bernilai positif dengan nilai p-value lebih kecil dari 0,05, sehingga keenam hipotesis penelitian dinyatakan diterima. Koefisien jalur pengaruh langsung terbesar dimiliki transparansi (0,236), sedangkan pada pengujian moderasi koefisien terbesar terdapat pada interaksi komitmen organisasi dengan transparansi (0,290).

**Pembahasan**

Bagian ini menginterpretasikan temuan penelitian dan menghubungkannya dengan tujuan penelitian, teori yang relevan, serta hasil penelitian terdahulu. Pembahasan disusun mengikuti urutan hipotesis penelitian.

**Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah**

Hasil pengujian menunjukkan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah (β = 0,236; p = 0,000 < 0,05), sehingga H1 diterima. Nilai cross loading tertinggi sebesar 0,908 terdapat pada indikator pengelolaan anggaran yang dikelola secara efektif dan efisien, sedangkan nilai terendah sebesar 0,700 terdapat pada indikator kualitas informasi kinerja yang lengkap dan jelas. Tanggapan responden terhadap variabel transparansi memperoleh rata-rata 4,21 yang termasuk kategori sangat baik.

Temuan ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi mengenai kebijakan, proses pengambilan keputusan, dan hasil pengelolaan anggaran memungkinkan pengawasan berjalan efektif, baik secara internal maupun oleh masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Pengawasan yang efektif mendorong aparatur bekerja lebih disiplin dan bertanggung jawab atas capaian kinerjanya, sekaligus mencegah penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Hasil ini sejalan dengan teori stakeholder yang menekankan pentingnya keterbukaan dalam menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan (Harjono & Zulkarnaen, 2017) serta konsisten dengan pandangan Garung dan Ga (2020) dan Ramadhani (2021) yang memposisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses informasi penyelenggaraan pemerintahan secara benar dan tidak diskriminatif. Temuan ini juga didukung hasil penelitian Solihah, Inapty, dan Suryantara (2022).

**Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah**

Akuntabilitas terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah (β = 0,220; p = 0,001 < 0,05), sehingga H2 diterima. Nilai cross loading tertinggi sebesar 0,924 terdapat pada indikator kemudahan akses laporan kinerja instansi, sementara nilai terendah sebesar 0,715 terdapat pada indikator keterkaitan pengelolaan anggaran dengan tingkat akuntabilitas. Rata-rata tanggapan responden sebesar 4,27 dan termasuk kategori sangat baik.

Hasil ini menunjukkan bahwa kejelasan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan, mendorong terciptanya sistem kerja yang tertib, terukur, dan berorientasi hasil. Temuan tersebut konsisten dengan hasil evaluasi AKIP Kabupaten Deli Serdang yang berada pada predikat BB (sangat baik) dengan rentang nilai 70–80 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021, yang ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja serta pengukuran kinerja hingga level eselon 3. Hasil ini mendukung pandangan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak yang diberi kepercayaan oleh stakeholders atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugasnya (Fajar Panuluh, 2020).

***Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Instansi Pemerintah***

Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah (β = 0,234; p = 0,000 < 0,05), sehingga H3 diterima. Variabel ini bahkan memiliki nilai F-Square tertinggi (0,681), yang berarti kontribusinya terhadap kinerja instansi pemerintah paling kuat di antara variabel lain dalam model. Nilai cross loading tertinggi sebesar 0,857 terdapat pada indikator pemahaman aparatur atas anggaran yang disusun, sedangkan nilai terendah sebesar 0,708 terdapat pada indikator penyusunan anggaran yang memperhatikan capaian program tahun sebelumnya.

Sasaran anggaran yang dirumuskan secara jelas dan terukur memberikan arah yang pasti mengenai apa yang harus dicapai, kapan harus dicapai, dan dengan sumber daya sebesar apa, sehingga mengurangi ambiguitas peran yang kerap menjadi penyebab rendahnya kinerja organisasi sektor publik. Kondisi ini memudahkan aparatur dalam mengevaluasi capaian kinerja dan mengambil keputusan yang lebih akuntabel. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Marbun, Sari, dan Irfan (2021), namun berbeda dengan Ismid, Kusmanto, dan Lubis (2020) yang tidak menemukan pengaruh signifikan.

**Peran Moderasi Komitmen Organisasi pada Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah**

Hasil pengujian moderasi menunjukkan komitmen organisasi secara signifikan memoderasi pengaruh transparansi terhadap kinerja instansi pemerintah (β = 0,290; p = 0,000 < 0,05), sehingga H4 diterima. Nilai cross loading tertinggi pada variabel komitmen organisasi sebesar 0,884 terdapat pada indikator kenyamanan bekerja di instansi, sedangkan nilai terendah sebesar 0,707 terdapat pada indikator cara menyikapi permasalahan instansi. Rata-rata tanggapan responden terhadap komitmen organisasi sebesar 4,20 dan termasuk kategori sangat baik.

Arah koefisien yang positif menunjukkan bahwa komitmen organisasi bersifat memperkuat. Pegawai dengan keterikatan emosional dan profesional yang tinggi cenderung memanfaatkan keterbukaan informasi anggaran sebagai sarana perbaikan kinerja, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Kuntadi dan Velayati (2022) serta Sari dan Widiatmoko (2023).

***Peran Moderasi Komitmen Organisasi pada Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah***

Komitmen organisasi juga terbukti memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah (β = 0,208; p = 0,017 < 0,05), sehingga H5 diterima. Nilai koefisien moderasi yang positif menunjukkan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi pegawai, semakin kuat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah.

Hasil ini dapat dijelaskan melalui pandangan Robbins dan Judge (2019) bahwa komitmen organisasi merupakan kekuatan relatif individu dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya ke dalam organisasi yang dicirikan oleh penerimaan nilai dan tujuan organisasi serta keinginan mempertahankan keanggotaan. Pegawai dengan komitmen tinggi memandang kewajiban pertanggungjawaban anggaran sebagai bagian dari tanggung jawab profesional, sehingga mekanisme akuntabilitas berjalan substantif dan berdampak nyata pada capaian kinerja. Temuan ini mendukung hasil penelitian Safitri dan Asyik (2022) serta Cantika, Mukhzarudfa, dan Zulma (2021).

**Peran Moderasi Komitmen Organisasi pada Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Instansi Pemerintah**

Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan komitmen organisasi memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja instansi pemerintah (β = 0,245; p = 0,001 < 0,05), sehingga H6 diterima. Kejelasan sasaran anggaran yang tinggi akan menghasilkan kinerja yang tinggi apabila disertai dedikasi dan dukungan yang kuat dari pegawai dalam pencapaian tujuan organisasi.

Sebaliknya, rendahnya komitmen pegawai berpotensi mengganggu kegiatan operasional instansi, menimbulkan ketidakdisiplinan, serta menurunkan kesiapan individu dalam menerima tantangan dan tanggung jawab pekerjaan. Temuan ini sejalan dengan Savitri, Suryani, dan Martini (2020) yang menempatkan komitmen organisasi sebagai penguat hubungan antara variabel penganggaran dan kinerja, namun berbeda dengan sebagian penelitian terdahulu yang tidak menemukan efek moderasi yang signifikan.

**Implikasi**

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat penerapan teori stakeholder dan goal-setting theory dalam konteks pemerintah daerah dengan menunjukkan bahwa komitmen organisasi berperan sebagai variabel penguat (quasi moderator) dalam hubungan antara prinsip tata kelola anggaran dan kinerja instansi pemerintah. Temuan ini sekaligus memberikan penjelasan atas ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, yaitu bahwa efektivitas transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan sasaran anggaran bergantung pada tingkat komitmen aparatur.

Secara praktis dan kebijakan, hasil penelitian mengimplikasikan perlunya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memprioritaskan tiga hal. Pertama, peningkatan keterbukaan informasi anggaran melalui dokumentasi yang jelas dan publikasi pada laman resmi masing-masing OPD agar informasi mudah diakses. Kedua, penguatan ketaatan pada peraturan pelaporan keuangan melalui penyusunan dan penyampaian dokumen perencanaan serta keuangan yang tepat waktu. Ketiga, penguatan komitmen organisasi melalui perbaikan iklim kerja dan pengembangan kapasitas aparatur, mengingat komitmen terbukti memperkuat seluruh hubungan yang diuji. Selain itu, pengukuran outcome program kerja perlu dipertegas agar hasil pelaksanaan program dapat dievaluasi secara terukur.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan sasaran anggaran masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang. Keempat variabel dalam model mampu menjelaskan 73,8% variasi kinerja instansi pemerintah, dengan kontribusi terkuat berasal dari kejelasan sasaran anggaran. Komitmen organisasi terbukti memoderasi dan memperkuat ketiga hubungan tersebut, sehingga keenam hipotesis penelitian diterima.

Temuan ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola anggaran tidak cukup dilakukan melalui perbaikan prosedur semata, melainkan perlu disertai pembinaan komitmen aparatur agar prinsip transparansi dan akuntabilitas dijalankan secara substantif. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data persepsi responden pada satu kabupaten dan membatasi model pada empat variabel, sehingga 26,2% variasi kinerja yang belum terjelaskan berpotensi dipengaruhi faktor lain seperti kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, atau kualitas sistem informasi pemerintahan daerah. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas wilayah penelitian, menambah variabel tersebut, serta mengombinasikan data persepsi dengan data kinerja sekunder agar generalisasi temuan menjadi lebih kuat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang beserta seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang telah memberikan izin, dukungan data, dan kesediaan menjadi responden dalam pelaksanaan penelitian ini.

**PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN (AI)**

Penulis menyatakan bahwa tidak ada alat kecerdasan buatan (AI) generatif yang digunakan dalam penyusunan substansi ilmiah manuskrip ini. Seluruh analisis, interpretasi, dan penulisan dilakukan sepenuhnya oleh penulis, serta penulis bertanggung jawab penuh atas keakuratan, orisinalitas, dan integritas isi manuskrip.

**KONFLIK KEPENTINGAN**

Penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan finansial, institusional, personal, maupun hubungan lain yang dapat memengaruhi pelaksanaan penelitian dan publikasi artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Cantika, S., Mukhzarudfa, M., & Zulma, G. W. M. (2021). Pengaruh partisipasi anggaran dan sistem pengendalian intern pemerintah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi terhadap

kinerja manajerial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21*(2), 628–635. https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1518

Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Dalam G. A. Marcoulides (Ed.), *Modern methods for business research* (hlm. 295–336). Lawrence Erlbaum Associates. https://doi.org/10.4324/9781410604385-10

Fajar Panuluh, G. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. *[Nama jurnal], 2*(1), 10–20.

Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian good governance pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas, 8*(1), 19–27.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2006). *Multivariate data analysis* (6th ed.). Pearson Prentice Hall.

Harjono, I., & Zulkarnaen, W. (2017). Pengaruh akuntabilitas, transparansi pengelolaan lembaga amil zakat dan pengentasan kemiskinan terhadap kepercayaan muzakki. *[Nama jurnal], 3*(2), 61–69.

Hutagalung, D. E., Sari, E. N., & Irfan. (2024). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan efektivitas sistem informasi pemerintahan daerah terhadap implementasi anggaran berbasis kinerja dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating (Studi pada UPT Puskesmas Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Medan). *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS), 4*(5). https://doi.org/10.47233/jebs.v4i5.2145

Ismid, F., Kusmanto, H., & Lubis, M. S. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah berbasis kinerja pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 2*(2), 129–140.

Kuntadi, C., & Velayati, E. (2022). Factors affecting the implementation of performance-based budget. *Eduvest – Journal of Universal Studies, 2*(9), 1931–1942.

Marbun, T. S., Sari, E. N., & Irfan, I. (2021). Pengaruh sistem informasi keuangan daerah dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Humaniora, 8*(1), 220–244.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

Pratolo, S., Sofyani, H., & Anwar, M. (2020). Performance-based budgeting implementation in higher education institutions: Determinants and impact on quality. *Cogent Business & Management, 7*(1), 1–22. https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1786315

Ramadhani, S. W. (2021). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat (Studi kasus: Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur). *Proaksi, 8*(2), 561–571.

Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2019). *Organizational behavior* (18th ed.). Pearson Education.

Safitri, R. D., & Asyik, N. F. (2022). Komitmen organisasi sebagai pemoderasi pada pengaruh partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA), 11*(10).

Sari, A., & Widiatmoko, J. (2023). Peran komitmen organisasi sebagai pemoderasi pengaruh sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business, 7*(2), 826. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.955

Savitri, D., Suryani, A., & Martini, L. (2020). Pengaruh partisipasi anggaran, asimetri informasi, dan penekanan anggaran terhadap senjangan anggaran dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. *Journal of Accounting and Finance Management, 8*(4), 267–281.

Solihah, F., Inapty, B. A., & Suryantara, A. B. (2022). Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan peran perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa (Studi empiris pada desa se-Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 2*(1), 136–154. https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.191

Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.